PUNGGAWA
GLOBAL RESEARCH:
JURNAL MULTIDISIPLIN

Punggawa Global Research: Jurnal Multidisiplin
Volume 1, Nomor 6, 2026
E-ISSN: 3164-0117
Open Access: punggawajournal.com/pgr

# Pahlawanku Teladanku: Membangun Integritas dan Budaya Melayani dalam Penyelenggaraan Transportasi Publik

**Try Sugiyarto Soeparyanto[1], Maudhy Satyadharma[2] Firmansyah[3]**
[1] Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo, Indonesia
[2] Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia
[3] Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia
*Korespondensi: maudhymaudhy@gmail.com[2]*

**Informasi Artikel**

**Riwayat artikel:**
Received Sept 23th, 2026
Revised Nov 1th, 2026
Accepted Nov 9th, 2026

**Keyword:**
Budaya Melayani; Hari Pahlawan; Nilai Perjuangan; Transportasi Publik.

**ABSTRAK**

Peringatan Hari Pahlawan 2026 menjadi momentum refleksi untuk mengaktualisasikan nilai pengabdian, pengorbanan, keberanian, dan gotong royong dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Artikel ini bertujuan menganalisis peran nilai kepahlawanan dalam membangun integritas aparatur dan budaya melayani pada sektor transportasi publik. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif-reflektif melalui studi kepustakaan dan analisis kebijakan, dengan mengkaji regulasi, literatur, serta konteks transportasi Sulawesi Tenggara. Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai kepahlawanan dapat diwujudkan melalui keteladanan, kepatuhan regulasi, akuntabilitas, profesionalisme, keselamatan, transparansi, dan kepedulian masyarakat. Penguatan nilai tersebut memerlukan kolaborasi dan pemanfaatan teknologi untuk mendorong pemerataan konektivitas serta pelayanan transportasi yang aman, nyaman, selamat, humanis, dan berkelanjutan.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

## PENDAHULUAN

Peringatan Hari Pahlawan bukan sekadar momentum mengenang peristiwa sejarah perjuangan bangsa, melainkan ruang refleksi untuk memahami kembali makna pengabdian, pengorbanan, keberanian, dan tanggung jawab terhadap masa depan Indonesia (Abdillah et al., 2025). Perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan telah mewariskan nilai-nilai luhur yang harus terus dihidupkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semangat tersebut memperoleh relevansi baru ketika dihadapkan pada tantangan pembangunan modern yang menuntut integritas, profesionalisme, kolaborasi, dan kepedulian terhadap kepentingan masyarakat (Upe, 2025).




Gambar 1 Tema Hari Pahlawan Tahun 2026
Sumber : eduinsights.id (2026)

Hari Pahlawan Tahun 2026 mengusung tema "Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan". Tema tersebut mengandung pesan bahwa perjuangan tidak berhenti pada keberhasilan merebut dan mempertahankan kemerdekaan, tetapi harus dilanjutkan melalui kontribusi nyata sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing. Keteladanan para pahlawan perlu diwujudkan dalam tindakan sehari-hari, sedangkan semangat melangkah bersama menegaskan pentingnya persatuan, gotong royong, dan kolaborasi dalam menghadapi berbagai persoalan pembangunan.

Dalam konteks pemerintahan, aparatur sipil negara (ASN) memiliki tanggung jawab untuk menerjemahkan nilai-nilai tersebut ke dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat (Hidayatullah, 2026; Sutrisno et al., 2026). Pengabdian kepada bangsa tidak hanya diwujudkan melalui simbol patriotisme, tetapi juga melalui kejujuran, kedisiplinan, kepatuhan terhadap peraturan, keberanian mengambil keputusan yang benar, serta kesediaan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun kelompok (Sudirman, 2026). Dengan demikian, ruang pelayanan publik dapat dipandang sebagai salah satu medan pengabdian masa kini, tempat nilai-nilai kepahlawanan diuji melalui kualitas tindakan dan tanggung jawab aparatur (Baka et al., 2026; Ghozi & Shodiq, 2025; Sjachrawy et al., 2025).

Transportasi publik merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki keterkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat (La Ode et al., 2024). Penyelenggaraannya tidak hanya berorientasi pada perpindahan orang dan barang, tetapi juga berhubungan dengan aksesibilitas, keselamatan, pemerataan pembangunan, aktivitas ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat. Transportasi yang aman, nyaman, tertib, terjangkau, dan berkelanjutan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkeadilan (Afra et al., 2026; Rajulan et al., 2025).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan pentingnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu. Sementara itu, Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik memberikan landasan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, profesionalitas, partisipasi, keterbukaan, akuntabilitas, serta ketepatan waktu. Kedua regulasi tersebut memperlihatkan bahwa penyelenggaraan transportasi bukan semata-mata persoalan teknis operasional, melainkan juga tanggung jawab etis dan administratif pemerintah kepada masyarakat.

Dalam praktiknya, penyelenggaraan transportasi publik menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kepatuhan terhadap perizinan angkutan, pemenuhan standar pelayanan, pengawasan operasional, ketersediaan sarana dan prasarana, hingga keterbatasan konektivitas di wilayah daratan, pesisir, dan kepulauan (Bakri et al., 2026). Pada wilayah dengan karakteristik geografis yang beragam seperti Sulawesi Tenggara, penyelenggaraan transportasi membutuhkan perhatian terhadap pemerataan akses, keterhubungan antarkawasan, serta kesinambungan pelayanan bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi dan pemerintahan (Arafah, 2025).

Tantangan tersebut tidak cukup diselesaikan melalui penyediaan infrastruktur dan penerbitan regulasi. Diperlukan aparatur yang memiliki integritas, kompetensi, kepedulian, dan komitmen untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat. Integritas menjadi fondasi agar kewenangan tidak disalahgunakan, sementara budaya melayani menjadi orientasi agar setiap tindakan organisasi diarahkan pada pemenuhan kebutuhan publik (Soares, 2025). Denhardt dan Denhardt (Herizal et al., 2020) melalui pendekatan New Public Service menekankan bahwa administrasi publik seharusnya melayani warga negara, bukan sekadar mengarahkan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Nilai kepahlawanan memiliki hubungan konseptual dengan prinsip tersebut. Keberanian para pahlawan dalam mempertahankan kepentingan bangsa dapat diterjemahkan menjadi keberanian aparatur dalam menegakkan aturan secara adil (Mustoko et al., 2026). Ketulusan pengorbanan dapat diwujudkan melalui kesediaan memberikan pelayanan tanpa diskriminasi (Maulana & Wahyudi, 2026). Sementara itu, semangat persatuan dapat diaktualisasikan melalui kolaborasi antara pemerintah, badan usaha angkutan, petugas operasional, dan masyarakat dalam membangun sistem transportasi yang lebih baik (Akbar, 2021).

Kebaruan pembahasan dalam artikel ini terletak pada upaya menghubungkan nilai kepahlawanan dengan integritas dan budaya melayani dalam penyelenggaraan transportasi publik. Nilai patriotisme tidak hanya ditempatkan sebagai konsep nasionalisme atau peringatan historis, tetapi diterjemahkan menjadi prinsip operasional dalam tata kelola transportasi, khususnya melalui

keteladanan aparatur, kepatuhan regulasi, keselamatan perjalanan, transparansi, dan pemerataan pelayanan.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis bagaimana nilai-nilai kepahlawanan dapat diaktualisasikan dalam membangun integritas aparatur dan budaya melayani pada penyelenggaraan transportasi publik, mengidentifikasi bentuk implementasinya dalam tata kelola pelayanan, serta merumuskan penguatan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan transportasi yang aman, nyaman, selamat, humanis, dan berkelanjutan.

## METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif-reflektif dengan metode studi kepustakaan dan analisis kebijakan. Pendekatan tersebut dipilih untuk mengkaji hubungan antara nilai kepahlawanan, integritas aparatur, budaya melayani, dan penyelenggaraan transportasi publik berdasarkan landasan konseptual, peraturan perundang-undangan, serta literatur yang relevan.

Sumber kajian terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan, pelayanan publik, serta aparatur sipil negara. Bahan sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal, publikasi ilmiah, dan dokumen kebijakan yang membahas integritas, etika administrasi publik, kualitas pelayanan, dan tata kelola transportasi.

Pengumpulan bahan dilakukan melalui penelusuran literatur, identifikasi regulasi, dan dokumentasi sumber tertulis. Bahan yang terkumpul kemudian diklasifikasikan ke dalam lima tema utama, yaitu: (1) nilai kepahlawanan dan patriotisme; (2) integritas dan keteladanan aparatur; (3) budaya melayani dalam administrasi publik; (4) akuntabilitas penyelenggaraan transportasi; serta (5) kolaborasi dan pemerataan pelayanan transportasi.

Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui interpretasi konseptual dan analisis isi terhadap sumber yang digunakan. Selanjutnya, hasil identifikasi disintesiskan untuk menemukan keterkaitan antara nilai-nilai kepahlawanan dengan prinsip penyelenggaraan pelayanan transportasi publik. Konteks Sulawesi Tenggara digunakan sebagai ruang refleksi kebijakan, terutama berkaitan dengan karakteristik pelayanan transportasi daratan, pesisir, dan kepulauan. Penelitian ini tidak menggunakan wawancara, kuesioner, ataupun observasi lapangan sehingga pembahasan tidak dimaksudkan sebagai pengukuran empiris terhadap kinerja organisasi tertentu.

.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Nilai Kepahlawanan sebagai Fondasi Pengabdian Aparatur

Nilai kepahlawanan pada hakikatnya tidak hanya berkaitan dengan keberanian menghadapi ancaman fisik, tetapi juga mencakup kesediaan mengutamakan kepentingan bersama, mempertahankan kebenaran, dan mengabdikan kemampuan untuk kepentingan bangsa (Nugroho, 2018). Dalam perspektif pemerintahan modern, nilai tersebut dapat diterjemahkan menjadi sikap profesional, jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat (Pamungkas, 2025).

Tema Hari Pahlawan 2026, *"Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan"*, mengandung tiga dimensi yang saling berkaitan. Pertama, keteladanan, yaitu menjadikan perilaku dan semangat para pahlawan sebagai inspirasi dalam menjalankan tanggung jawab (Setianto, 2019). Kedua, kebersamaan, yaitu membangun kesadaran bahwa pelayanan publik membutuhkan keterlibatan berbagai pihak (Irawan et al., 2025). Ketiga, keberlanjutan perjuangan, yaitu meneruskan cita-cita bangsa melalui kontribusi nyata dalam pembangunan (Satyadharma, Barmuddin, et al., 2025).

Ketiga dimensi tersebut memiliki relevansi kuat dengan tugas aparatur transportasi. Petugas yang menjalankan pengawasan angkutan, memberikan informasi kepada penumpang, memastikan kelayakan kendaraan, mengatur pelayanan terminal, dan mendukung operasional pelabuhan pada dasarnya sedang menjalankan bentuk pengabdian kepada masyarakat (Asya'ari et al., 2025). Tindakan sederhana seperti memberikan informasi secara jujur, melaksanakan pemeriksaan sesuai prosedur, membantu penumpang yang membutuhkan, serta menolak penyimpangan dalam pelayanan merupakan wujud konkret nilai kepahlawanan (Sembiring, 2021).

Oleh karena itu, makna menjadi pahlawan masa kini tidak harus diwujudkan melalui tindakan heroik yang luar biasa. Kepahlawanan dapat hadir melalui konsistensi menjalankan tugas dengan benar, keberanian mempertahankan integritas, dan kepedulian terhadap keselamatan masyarakat. Dalam

perspektif pelayanan publik, kualitas pengabdian aparatur dapat dinilai melalui manfaat yang dirasakan masyarakat, bukan semata-mata dari formalitas pelaksanaan kegiatan (Wanto, 2026).

## 2. Integritas Aparatur sebagai Pilar Penyelenggaraan Transportasi Publik

Integritas merupakan kesesuaian antara nilai moral, perkataan, keputusan, dan tindakan seseorang dalam menjalankan tanggung jawab (Wisesa, 2011). Dalam organisasi pemerintahan, integritas menjadi prasyarat untuk membangun kepercayaan masyarakat, mencegah penyalahgunaan kewenangan, dan memastikan pelayanan dilaksanakan sesuai ketentuan (Nuradhawati & Rahmandika, 2025).

Penyelenggaraan transportasi publik memiliki ruang kewenangan yang memerlukan integritas tinggi, terutama dalam proses perizinan angkutan, pemeriksaan kendaraan, pengawasan operasional, pengelolaan fasilitas transportasi, dan pelayanan retribusi (Sayudi et al., 2025). Setiap keputusan aparatur pada bidang tersebut berpotensi memengaruhi keselamatan, kepastian hukum, dan kepentingan ekonomi masyarakat.

Integritas dalam pelayanan transportasi dapat diwujudkan melalui beberapa prinsip berikut.

**a. Kejujuran dan transparansi**

Setiap proses pelayanan harus dilaksanakan berdasarkan informasi yang benar, prosedur yang jelas, dan persyaratan yang dapat diketahui masyarakat (Bazarah et al., 2021). Transparansi diperlukan agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai mekanisme pelayanan, biaya, waktu penyelesaian, dan hak maupun kewajiban pengguna jasa (Widanti, 2022).

**b. Kepatuhan terhadap regulasi**

Aparatur harus konsisten melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam pembinaan dan pengawasan angkutan. Penegakan aturan tidak boleh dipengaruhi kepentingan pribadi, hubungan tertentu, ataupun tekanan kelompok. Prinsip keadilan mengharuskan setiap penyelenggara angkutan memperoleh perlakuan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Ferima et al., 2026).

**c. Akuntabilitas kewenangan**

Setiap tindakan dan keputusan aparatur harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan moral. Pelaksanaan pemeriksaan, pengawasan, dan pengelolaan pelayanan harus memiliki dokumentasi yang memadai sehingga dapat ditelusuri dan dievaluasi (Sulastri, 2026).

**d. Keteladanan dalam bekerja**

Pimpinan dan aparatur perlu menunjukkan konsistensi antara arahan dan tindakan. Kedisiplinan waktu, kepatuhan terhadap standar operasional prosedur, kesediaan menerima kritik, dan ketegasan dalam menegakkan aturan merupakan contoh keteladanan yang membentuk kepercayaan internal maupun eksternal organisasi (Firdausi & Zahroh, 2025).

Dalam hal ini, nilai kepahlawanan dapat menjadi sumber motivasi moral bagi aparatur untuk tidak berkompromi terhadap penyimpangan yang merugikan kepentingan masyarakat (Ropiah, 2026). Integritas tidak cukup disampaikan melalui slogan atau deklarasi, tetapi harus tercermin dalam keputusan dan perilaku pelayanan sehari-hari.

## 3. Membangun Budaya Melayani yang Humanis dan Berorientasi pada Masyarakat

Budaya melayani merupakan pola nilai, sikap, dan perilaku organisasi yang menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai orientasi utama pelaksanaan tugas. Budaya tersebut tidak hanya berhubungan dengan keramahan petugas, tetapi juga menyangkut kepastian pelayanan, kecepatan respons, keterbukaan informasi, kesetaraan perlakuan, dan kemampuan menyelesaikan permasalahan masyarakat (Sutrisno et al., 2026).

Denhardt dan Denhardt (Herizal et al., 2020) menjelaskan bahwa pemerintah perlu membangun orientasi pelayanan yang menempatkan warga negara sebagai pemilik kepentingan publik. Artinya, masyarakat bukan sekadar objek kebijakan, melainkan pihak yang harus dilibatkan dan dihargai dalam proses penyelenggaraan pelayanan.

Dalam sektor transportasi, budaya melayani dapat diwujudkan melalui perhatian terhadap kebutuhan penumpang, pengguna terminal, masyarakat di kawasan pelabuhan, dan kelompok yang membutuhkan pelayanan khusus (Hermansah et al., 2019). Petugas transportasi dituntut tidak hanya

memahami aspek teknis pekerjaan, tetapi juga memiliki empati, kemampuan komunikasi, kesabaran, dan kepekaan terhadap kondisi masyarakat.

Budaya melayani yang humanis pada instansi pemerintahan setidaknya mencakup empat dimensi diantaranya :

a. **Responsivitas**, yaitu kemampuan aparatur merespons kebutuhan, keluhan, dan permasalahan pengguna transportasi secara cepat dan tepat (Hermansah et al., 2019).
b. **Kesetaraan**, yaitu memberikan pelayanan tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, maupun kondisi fisik pengguna (Mulyadi et al., 2025).
c. **Kepastian**, yaitu memastikan pelayanan berjalan berdasarkan standar dan prosedur yang jelas (Silva & Rosdiana, 2025).
d. **Kepedulian**, yaitu menempatkan keselamatan dan kenyamanan masyarakat sebagai pertimbangan utama dalam setiap tindakan pelayanan (Masyi'ah & Yulian Sembiring, 2023).

Nilai kepahlawanan dalam konteks tersebut tercermin melalui ketulusan membantu masyarakat, kesediaan bekerja melampaui kepentingan pribadi, serta komitmen memberikan pelayanan terbaik meskipun menghadapi keterbatasan fasilitas dan kondisi operasional (Setiyadi & Jumaedi, 2025). Dengan demikian, budaya melayani tidak hanya menjadi tuntutan administratif, tetapi juga manifestasi etika pengabdian kepada bangsa yang tercermin melalui integritas, profesionalisme, kepedulian, tanggung jawab, serta komitmen menghadirkan pelayanan publik yang adil, berkualitas, humanis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (Hermawan & Sarif, 2026).

## 4. Aktualisasi Nilai Kepahlawanan dalam Tata Kelola Transportasi Publik

Nilai kepahlawanan akan memiliki makna praktis apabila diterjemahkan ke dalam sistem kerja dan kebijakan organisasi. Dalam penyelenggaraan transportasi publik, aktualisasinya dapat dilakukan melalui beberapa bidang berikut.

### a. Keselamatan sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat

Keselamatan merupakan prinsip utama yang tidak dapat dikompromikan dalam penyelenggaraan transportasi. Pemeriksaan kelayakan kendaraan, pengawasan operasional angkutan, pengendalian risiko perjalanan, serta pembinaan pengemudi merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk melindungi masyarakat (Hasanah & Suwarno, 2026).

Aparatur yang mengutamakan keselamatan menunjukkan keberanian moral untuk mengambil keputusan berdasarkan kepentingan publik, termasuk ketika harus menunda atau membatasi pelayanan yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan (Wahyudi, 2026).

### b. Penegakan aturan dan kepatuhan perizinan angkutan

Kepatuhan terhadap perizinan merupakan bagian dari tata kelola transportasi yang tertib dan bertanggung jawab. Pembinaan dan pengawasan harus dilaksanakan secara konsisten agar penyelenggaraan angkutan berjalan sesuai ketentuan (Syaiful et al., 2025). Pendekatan pembinaan perlu mengedepankan edukasi, komunikasi, pendataan, dan pendampingan tanpa mengabaikan kewajiban penegakan aturan.

Dalam perspektif kepahlawanan, keberanian menegakkan ketentuan secara objektif merupakan bentuk integritas aparatur (Satyadharma, Sutriana, et al., 2025). Penegakan aturan yang adil akan menciptakan kepastian hukum sekaligus melindungi kepentingan pengguna jasa dan penyelenggara angkutan yang telah memenuhi persyaratan (Diptha & Mahadewi, 2024).

### c. Transparansi dan digitalisasi pelayanan

Pemanfaatan teknologi informasi dapat memperkuat integritas melalui peningkatan keterbukaan, ketertelusuran transaksi, dan efisiensi pelayanan (Almaliki et al., 2026). Digitalisasi pelayanan seperti sistem informasi, pembayaran non-tunai, dan pengelolaan data retribusi dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap proses manual yang rentan terhadap ketidakteraturan administrasi (Satyadharma, 2026).

Namun, transformasi digital tidak boleh hanya berorientasi pada penggunaan aplikasi. Keberhasilannya ditentukan oleh kualitas tata kelola, kesiapan aparatur, keamanan data, kemudahan akses, serta manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Digitalisasi harus menjadi instrumen

untuk memperkuat akuntabilitas dan kualitas pelayanan, bukan sekadar simbol modernisasi organisasi (Satyadharma, 2026).

**d. Pemerataan konektivitas wilayah**

Dalam wilayah seperti provinsi Sulawesi Tenggara, penyelenggaraan transportasi memiliki tantangan geografis karena mencakup wilayah daratan dan kepulauan. Konektivitas antardaerah menjadi kebutuhan penting untuk mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, serta aktivitas ekonomi (Rajulan et al., 2026).

Nilai persatuan dan gotong royong dalam tema Hari Pahlawan 2026 dapat diterjemahkan melalui penguatan koordinasi antarpemangku kepentingan untuk mengatasi kesenjangan pelayanan transportasi. Pemerataan akses tidak hanya diukur dari tersedianya sarana dan prasarana, tetapi juga dari keterjangkauan layanan, kesinambungan perjalanan, keselamatan, dan kemampuan masyarakat memperoleh manfaat transportasi (Rajulan et al., 2026).




Gambar 2 Kegiatan Pelayanan Angkutan Penyeberangan bagi Rombingan Perkemahan Depag Tahun 2026 di Pelabuhan Penyeberangan Amolengo

Dengan demikian, keberpihakan terhadap wilayah yang memiliki keterbatasan akses merupakan salah satu wujud nyata pengabdian pemerintah dalam menghadirkan keadilan pelayanan.

**5. Keteladanan Pimpinan dan Pembentukan Karakter Aparatur**

Budaya organisasi tidak terbentuk hanya melalui peraturan tertulis, tetapi juga melalui kebiasaan, pola komunikasi, dan keteladanan pimpinan (Tjahyanti et al., 2026). Pimpinan memiliki peran strategis dalam membangun lingkungan kerja yang menjunjung tinggi integritas, disiplin, tanggung jawab, dan orientasi pelayanan (Khaulah et al., 2025; Rianse et al., 2026).

Keteladanan perlu dimulai dari konsistensi pimpinan dalam menjalankan aturan yang sama, memberikan arahan yang jelas, menghindari perlakuan diskriminatif, serta menunjukkan keberanian dalam mengambil keputusan berdasarkan kepentingan organisasi dan masyarakat (Asriyati & Satyadharma, 2023; Fasikin et al., 2025; Hasina & Satyadharma, 2023; Satyadharma, Cahyaniza, et al., 2025). Ketika pimpinan mampu menjadi contoh, nilai-nilai organisasi akan lebih mudah diterima dan diinternalisasi oleh aparatur.

Dalam penyelenggaraan transportasi publik, pembentukan karakter aparatur dapat dilakukan melalui pembinaan berkala, penguatan kompetensi, evaluasi kinerja, pengawasan operasional, serta pemberian apresiasi terhadap perilaku pelayanan yang baik (Nalu, 2026). Pembinaan tidak seharusnya hanya berorientasi pada pencapaian target administratif, tetapi juga harus memperhatikan kualitas interaksi aparatur dengan masyarakat.

Nilai kepahlawanan dapat menjadi landasan moral dalam proses pembinaan tersebut. Semangat pantang menyerah diterjemahkan menjadi ketangguhan menghadapi tantangan pekerjaan, keberanian

menjadi teladan diwujudkan melalui kedisiplinan, sedangkan semangat rela berkorban tercermin dalam kesediaan mendahulukan kepentingan masyarakat (Mandacan, 2025).

Oleh karena itu, keberhasilan organisasi sektor transportasi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran, sarana, dan teknologi, tetapi juga oleh kualitas karakter aparatur yang menjalankan pelayanan kepada masyarakat dengan humanis serta menjunjung tinggi integritas, disiplin, profesionalisme, empati, dan tanggung jawab dalam mewujudkan sistem transportasi yang aman, nyaman, selamat, inklusif, dan berkelanjutan. (Chakim et al., 2026).

## 6. Kolaborasi dan Gotong Royong dalam Mewujudkan Pelayanan Transportasi Berkelanjutan

Penyelenggaraan transportasi merupakan urusan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Pemerintah, badan usaha angkutan, pengelola fasilitas transportasi, aparat penegak hukum, masyarakat, dan lembaga terkait memiliki peran yang saling melengkapi (Latullah et al., 2025).

Tema *"Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan"* memberikan pesan bahwa perbaikan pelayanan tidak dapat dilakukan secara individual. Diperlukan kolaborasi untuk membangun sistem transportasi yang terintegrasi, aman, dan berkelanjutan.

Kolaborasi dapat dimulai melalui koordinasi pertukaran data, pembinaan badan usaha angkutan, penyelarasan standar pelayanan, pengawasan bersama, dan pelibatan masyarakat dalam penyampaian aspirasi (Djuwita et al., 2026). Partisipasi masyarakat menjadi penting karena pengguna transportasi merupakan pihak yang secara langsung merasakan kualitas maupun kekurangan pelayanan (Agustin & Khuzaini, 2017).

Selain itu, penyelenggaraan transportasi berkelanjutan membutuhkan keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kebijakan transportasi harus memperhatikan aksesibilitas kelompok masyarakat, efisiensi penggunaan sumber daya, keselamatan, serta dampak lingkungan dari aktivitas transportasi (Oktavia et al., 2025).

Dengan demikian, semangat gotong royong dalam nilai kepahlawanan dapat menjadi dasar untuk membangun tata kelola transportasi yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan jangka pendek, tetapi juga memperhatikan kebutuhan generasi mendatang (Hasina et al., 2026).

## 7. Model Aktualisasi Nilai Kepahlawanan dalam Budaya Melayani

Berdasarkan sintesis konseptual, aktualisasi nilai kepahlawanan dalam penyelenggaraan transportasi publik dapat dirumuskan melalui lima dimensi yang saling berkaitan, yaitu keteladanan, integritas, profesionalisme, kepedulian, dan kolaborasi.

**Tabel 1 Model Aktualisasi Nilai Kepahlawanan dalam Budaya Melayani**

| Nilai kepahlawanan | Aktualisasi dalam pelayanan transportasi | Orientasi hasil |
|---|---|---|
| Keteladanan | Disiplin dan konsistensi pimpinan serta aparatur | Budaya kerja positif |
| Kejujuran | Transparansi dan akuntabilitas pelayanan | Kepercayaan masyarakat |
| Keberanian | Penegakan regulasi dan pengutamaan keselamatan | Kepastian dan perlindungan hukum |
| Pengorbanan | Pelayanan yang tulus dan tidak diskriminatif | Kepuasan dan keadilan pelayanan |
| Gotong royong | Kolaborasi pemerintah, badan usaha, dan masyarakat | Konektivitas berkelanjutan |

Sumber :Data diolah (2026)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai kepahlawanan dapat diterjemahkan menjadi perilaku organisasi yang konkret. Keteladanan membentuk lingkungan kerja, integritas menjaga kepercayaan,

profesionalisme memastikan kualitas pelaksanaan tugas, kepedulian memperkuat dimensi humanis, sedangkan kolaborasi mendorong keberlanjutan pelayanan.

Kelima dimensi tersebut bukan unsur yang berdiri sendiri. Integritas tanpa profesionalisme dapat menghambat efektivitas pelayanan, sedangkan profesionalisme tanpa kepedulian berpotensi menghasilkan pelayanan yang kaku dan tidak humanis. Demikian pula, kolaborasi tanpa akuntabilitas dapat melemahkan kejelasan tanggung jawab antarpihak (Pakudu, 2024).

Oleh karena itu, penguatan budaya melayani perlu dilakukan secara menyeluruh melalui kebijakan organisasi, pembinaan sumber daya manusia, pengawasan, pemanfaatan teknologi, dan evaluasi pelayanan. Nilai kepahlawanan harus menjadi bagian dari perilaku kerja yang dapat diamati dan dipertanggungjawabkan, bukan berhenti pada pesan moral yang disampaikan dalam kegiatan seremonial.

## KESIMPULAN

Nilai kepahlawanan berperan penting dalam membangun integritas aparatur dan budaya melayani melalui keteladanan, kejujuran, keberanian, pengorbanan, dan gotong royong. Aktualisasinya diwujudkan melalui kepatuhan regulasi, akuntabilitas, keselamatan, transparansi, profesionalisme, serta kepedulian terhadap masyarakat. Dalam konteks Sulawesi Tenggara, penguatan nilai tersebut mendorong pemerataan konektivitas transportasi wilayah daratan, pesisir, dan kepulauan melalui kolaborasi serta pemanfaatan teknologi. Semangat Hari Pahlawan 2026 harus diterjemahkan menjadi pengabdian nyata melalui pelayanan transportasi yang aman, nyaman, selamat, humanis, dan berkelanjutan, dengan mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai wujud perjuangan masa kini.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, N., Fauziah, R. R., Rachman, A., Agamis, N. A. I., Firmansah, M. Y., Hafidho, N., Nathania, N., Naini, A. N., Nathania, N., Mustikawati, S., & Qomairoh, Q. (2025). Edukasi Nasionalisme dalam Peringatan Hari Pahlawan. *Kolaborasi : Jurnal Hasil Kegiatan Kolaborasi Pengabdian Masyarakat*, *3*(4), 64–81. https://doi.org/10.62383/kolaborasi.v3i4.878

Afra, L., Abdullah, Z., Usrina, N., Anna, K., Pramanda, H., & Satyadharma, M. (2026). *Dasar-Dasar Perencanaan Transportasi: Pendekatan Terpadu untuk Sistem Transportasi*. Kamiya Jaya Aquatic.

Agustin, A., & Khuzaini, K. (2017). Persepsi Masyarakat Terhadap Penggunaan Transportasi Online (Go-Jek) Di Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen (JIRM)*, *6*(9). https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jirm/article/view/323

Akbar, A. A. (2021). *Collaborative Governance untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Transportasi di Kota Makassar*. Universitas Hasanuddin.

Almaliki, M. F., Satyadharma, M., & Hado, H. (2026). Digital Transformation of Public Transportation Services: Exploring the Values of Trustworthiness (Amanah), Integrity, and Nationalism (A Study at the Southeast Sulawesi Provincial Transportation Agency). *Artificial: Journal of Technology, Information, Communication and Education*, *1*(2), 44–55. https://jurnalnalar.com/index.php/artificial/article/view/100

Arafah, I. H. M. (2025). *Membangun Akses, Mewujudkan Ketahanan Transportasi Udara Di Kawasan 3T*. PT. Samudra Solusi Profesional.

Asriyati, & Satyadharma, M. (2023). Peran Pemimpin dan Komunikasi Interpersonal dalam Penerapan Aplikasi Simponi ASN di Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara. *MASIP : Jurnal Manajemen Administrasi Bisnis Dan Publik Terapan*, *1*(4), 16–26. https://doi.org/10.59061/masip.v1i4.453

Asya'ari, I., Marwiyah, S., & Aribawa, M. Y. (2025). Peran Operator Terminal Dalam Penegakan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Umum. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, *5*(3). https://doi.org/10.53363/bureau.v5i3.852

Baka, W. K., Rianse, U., Rajulan, M., Mursalim, S., Silondae, T. T. A., Sjachrawy, L. O. M. I., & Prasetyo, E. W. (2026). *Dari Sejarah Perjuangan Menuju Masa Depan Bangsa*. Luana Publishing House.

Bakri, M. D., Waris, I. M., Ahsan, L. M. F., Bua, R. T., RH, M. W. B., Satyadharma, M., Askar, M., & Syaifudin, M. F. A. (2026). *Angkutan Umum Antar Kota dalam Provinsi (AKDP)*. Arsy Media.

Bazarah, J., Jubaidi, A., & Hubaib, F. (2021). Konsep Pelayanan Publik di Indonesia (Analisis Literasi

Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia). *DEDIKASI: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya*, *22*(2), 105–122. https://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/dedikasi/article/view/5860

Chakim, M. H. R., Maulidizen, A., Albar, F. M., Waskita, G. S., Dewi, M., Utami, E. M., Junaida, E., Mangga, A. R., Satyadharma, M., Hasina, H., Oemar, M. D., & Sjachrawy, L. O. M. I. (2026). *Manajemen Pelayanan Publik: Konsep, Kebijakan, dan Inovasi*. Sada Kurnia Pustaka.

Diptha, G. A. R. A., & Mahadewi, K. J. (2024). Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Penggunaan Jasa Transportasi Online Di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, *8*(1), 458–465. https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.4816

Djuwita, T. M., Sopandi, E., & Fadhilah, U. N. (2026). *Membangun Infrastruktur Melalui Kolaborasi (Praktik Kemitraan Pemerintah Dan Swasta)*. CV. Cipta Media Publishing.

eduinsights.id. (2026). Kemensos Luncurkan Logo Hari Pahlawan 2026 Lengkap Dengan Tema dan Maknanya. *Edu Insights*. https://eduinsights.id/kemensos-luncurkan-logo-hari-pahlawan-2026-lengkap-dengan-tema-dan-maknanya/

Fasikin, L. O., Kasim, S. S., Satyadharma, M., Asis, P. H., & Wahiyuddin, L. O. (2025). Penguatan Kepemimpinan Digital Di Sektor Pemerintahan Dalam Mendorong Peningkatan Layanan Publik Yang Akuntabel, Efisien Dan Efektif (Studi Pada Kantor Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum Dan Politik Provinsi Sulawesi Tenggara). *The World of Public Administration Journal*. https://doi.org/10.37950/wpaj.v7i1.2105

Ferima, F., Maudhy Satyadharma, Muhammad Yazir Jabbar, Hado, H., & Muhamad Rajulan. (2026). Optimalisasi Pelayanan Prima Melalui Konsep A6 di Pelabuhan Penyeberangan Torobulu. *Journal of Science, Technology, and Innovation*, *1*(3), 135–144. https://doi.org/10.65310/qjcvj860

Firdausi, R., & Zahroh, F. (2025). *Efektivitas Kepemimpinan*. Kramantara JS.

Ghozi, A. A., & Shodiq, J. (2025). Core Value Berakhlak Aparatur Sipil Negara sebagai Nilai-Nilai Budaya Kerja dalam Pelayanan Publik. *Wawasan: Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta*, *6*(1), 1–15. https://doi.org/10.53800/kvht8708

Hasanah, I. R., & Suwarno, E. (2026). *Hukum Transportasi Modern: Regulasi, Keselamatan, dan Tanggung Jawab Hukum*. Minhaj Pustaka.

Hasina, H., Mursalim, S., Sulistyo, G. A., & Sutriana, R. (2026). Implementasi Nilai Nasionalisme dalam Pengembangan Infrastruktur: The Implementation of Nationalism Values in Infrastructure Development. *JAGADDHITA: Jurnal Kebhinnekaan Dan Wawasan Kebangsaan*, *5*(2), 28–40. https://doi.org/10.30998/0arxav34

Hasina, H., & Satyadharma, M. (2023). Peran Pemimpin dalam Pencapaian Tujuan Organisasi: Studi Pada DPD Pemuda Panca Marga Provinsi Sulawesi Tenggara. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, *3*(1), 25–34. https://doi.org/10.57250/ajsh.v3i1.175

Herizal, H., Mukhrijal, M., & Wance, M. (2020). Pendekatan Akuntabilitas Pelayanan Publik Dalam Mengikuti Perubahan Paradigma Baru Administrasi Publik. *Journal of Governance and Social Policy*, *1*(1), 24–34. https://doi.org/10.24815/gaspol.v1i1.17327

Hermansah, Yamin, A., & Suparman. (2019). *Meningkatkan Kualitas Layanan Publik di Pelabuhan: Peran Responsivitas dan Kemampuan Pelayanan Pegawai*. Jakad Media Publishing.

Hermawan, A., & Sarif, S. (2026). *Kepemimpinan Melayani 5.0 Konvergensi Barat Dan Kearifan Nusantara Dalam Transformasi Pendidikan*. PT Insight Pustaka Nusa Utama.

Hidayatullah, H. (2026). *ASN BERAKHLAK di Era Digital: Etika, Integritas, dan Pelayanan Publik*. Tren Digital Publishing.

Irawan, E. P., Minarsi, A., Rianty, E., Halim, B., Putri, R. N. I., & Juansa, A. (2025). *Komunikasi Pelayanan Publik*. Star Digital Publishing.

Khaulah, S., Komariah, A., Sa'ud, U. S., & Marwan, M. (2025). *Model Kepemimpinan Visioner Berbasis Integritas dan Profesionalitas: Strategi Peningkatan Mutu SMK*. Star Digital Publishing.

La Ode, A. T., Safar, A., Saudi, A. I., Ampangallo, B. A., Syukuriah, Yunus, A. Y., Syaiful, Sampe, R., & Rachman, R. M. (2024). *Transportasi Publik*. Tohar Media.

Latullah, R. H., Sulistyo, G. A., Satyadharma, M., & Hado, H. (2025). Collaborative Governance dalam Pengawasan Angkutan Barang Umum yang Berkontribusi terhadap Program Zero Over Dimension dan Over Loading. *Journal of Engineering and Applied Technology*, *1*(2), 30–37. https://doi.org/10.65310/ty3esh07

Mandacan, L. (2025). *Menjadi Pemimpin Itu Tidak Mudah*. Edwrite Publishing.

Masyi'ah, A. N., & Yulian Sembiring, J. (2023). Analisis Strategi Pelayanan Prima (Service Excellence) Personel Aviation Security Bandar Udara Sentani. *Jurnal Manajemen Dirgantara*, *16*(1), 1–9. https://doi.org/10.56521/manajemen-dirgantara.v16i1.828

Maulana, J., & Wahyudi. (2026). *Pendekatan Humanis dalam Pelayanan Publik*. Penamuda Media.

Mulyadi, A. W. E., Nurhaeni, I. D. A., Haryani, T. N., Yuliani, S., Widyawatie, R., Putri, M. N. D., & Aditya, I. (2025). Pemahaman dan Penerapan Inklusi Sosial dalam Pelayanan Publik di Tingkat Desa. *Musamus Journal of Public Administration*, *7*(2), 247–256. https://doi.org/10.35724/mjpa.v7i2.6998

Mustoko, K. I. D. H., Nugroho, I. A., Damayanti, N., & Pawenary, I. H. (2026). *Kepemimpinan Bela Negara: Membentuk Pemimpin Berkarakter, Berintegritas, Dan Berjiwa Bela Negara Untuk Indonesia Emas 2045*. Dira Media Kreasindo.

Nalu, K. (2026). *Pelayanan Publik: Teori, Praktik, dan Reformasi Menuju Good Governance*. Hafizhah Press.

Nugroho, W. (2018). *Pahlawan Zaman Old: Menggali Warisan Nilai-Nilai Keteladanan Kebangsaan*. CV Jejak (Jejak Publisher).

Nuradhawati, R., & Rahmandika, M. A. (2025). *Etika Kepemimpinan dalam Pemerintahan: Membangun Integritas dan Kepercayaan Publik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Oktavia, A., Judijanto, L., Afni, D. N., Silova, M. A., & Firdaus, H. (2025). *Pengantar Teknik Transportasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Pakudu, R. (2024). *Sinergi Birokrasi: Membangun Pelayanan Publik yang Efektif*. Mega Press Nusantara.

Pamungkas, P. (2025). Etika Administrasi dalam Membangun Integritas Publik. *Civic Education Perspective Journal*, *5*(1), 42–52. https://doi.org/10.22437/cepj.v5i1.41723

Rajulan, M., Satyadharma, M., Suhartono, A., Hado, & Sulistyo, G. A. (2026). Reflection on National Defense Day: Nationalism From the Perspective of Equitable Transportation in Southeast Sulawesi Province. *Academy of Social Science and Global Citizenship Journal*, *6*(1), 18–32. https://doi.org/10.47200/aossagcj.v6i1.3533

Rajulan, M., Sulistyo, G. A., Syaiful, & Satyadharma, M. (2025). Semangat Pahlawan Sebagai Teladan dalam Membangun Transportasi Berkeadilan. *JIMU:Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, *3*(04), 1326–1334. https://doi.org/10.70294/jimu.v3i04.1536

Rianse, U., Sahlan, M. F., Tepu, D., & Satyadharma, M. (2026). *Kepemimpinan, Kinerja ASN, dan Transformasi Pelayanan Publik: Teori, Strategi, dan Praktik Dalam Organisasi Pemerintahan*. Kamiya Jaya Aquatic.

Ropiah, S. (2026). *Melawan Korupsi Ala Syariah: Dari Dalil Ke Aksi Nyata (Strategi Hukum Islam Untuk Masyarakat Bersih)*. Goresan Pena.

Satyadharma, M. (2026). Digitalisasi Pelayanan Transportasi Sebagai Bentuk Inovasi Pelayanan Publik Di Provinsi Sulawesi Tenggara. *DECISION: Jurnal Administrasi Publik*, *8*(2), 60–69. https://doi.org/10.23969/decision.v8i2.65706

Satyadharma, M., Barmuddin, B., NurSafitri, T., Putra, Z., & Kasim, S. S. (2025). Strategic Partnership between the Government and Veterans Organizations: A Case Study of PPM and LVRI in Southeast Sulawesi Province. *Synergy: Journal of Governance and Public Policy*, *1*(1), 42–49. https://sinergijournal.id/index.php/sjgp/article/view/55

Satyadharma, M., Cahyaniza, & Wirayanti, P. (2025). Peran Pemimpin dalam Mendorong Solidaritas dan Keterlibatan Organisasi di Instansi Sektor Publik. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, *3*(10). https://doi.org/10.62281/wmsfn593

Satyadharma, M., Sutriana, R., Mursalim, S., & Asiz, P. H. (2025). Analisis Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling pada Pengelolaan Program Mudik Gratis Sulawesi Tenggara 2026. *Cangkal: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, *1*(2), 273–284. https://batuahjurnal.my.id/index.php/cjish/article/view/142

Sayudi, M. H., Subekti, S., & Amiq, B. (2025). Tanggungjawab Pengawas Terminal Dalam Menegakkan Ketertiban Dan Keamanan Angkutan Umum. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, *5*(3), 4025–4047. https://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/859

Sembiring, H. R. U. (2021). *Membangun Pribadi Prima Dalam Pelayanan Publik*. Media Nusa

Creative (MNC Publishing).

Setianto, Y. (2019). Pendidikan Karakter Melalui Keteladanan Pahlawan Nasional. *Publikasi Pendidikan*, *9*(2), 177. https://doi.org/10.26858/publikan.v9i2.9267

Setiyadi, D., & Jumaedi, J. (2025). *Kepemimpinan Yang Menghidupkan: Transformasi SDM Melalui Nilai, Empati, dan Karakter*. Alungcipta.

Silva, N. N., & Rosdiana, W. (2025). Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik di Kelurahan Tambaksari. *Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan*, *3*(2). https://doi.org/https://journal.unesa.ac.id/index.php/innovant/article/view/40582

Sjachrawy, L. O. M. I., Hasmawati, Morini, & Satyadharma, M. (2025). Pahlawanku Teladanku: Internalisasi Nilai Kepahlawanan Dalam Peningkatan Layanan Publik di Indonesia. *JIMU:Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, *3*(04). https://doi.org/10.70294/jimu.v3i04.1554

Soares, E. M. P. (2025). *Etika Pemerintahan Daerah Jalan Menuju Pelayanan Publik Yang Berkeadaban*. CV. Intelektual Manifes Media.

Sudirman, S. (2026). *Membangun Karakter Kebangsaan Warga Negara Indonesia*. CV Eureka Media Aksara.

Sulastri, L. (2026). *Akuntabilitas Publik di Era Digital: Transparansi, Kinerja, dan Pelayanan Publik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Sutrisno, R., Satyadharma, M., Octaviani, S. W. D., & Akbar, L. O. M. (2026). Makna Semangat Melayani Negeri bagi Aparatur Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. *Journal of Science, Technology, and Innovation*, *1*(3), 351–362. https://doi.org/10.65310/c5r8s978

Syaiful, S., Laode, T., Ahzar, L. M., Firmansyah, F., Satyadharma, M., Susanti, N., Hado, H., Sulistyo, G. A., & Almaliki, M. F. (2025). Peningkatan Kinerja Terminal dan Kepatuhan Pengemudi Angkutan Umum di Kabupaten Kolaka Utara. *INANTA | Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *1*(2), 1–9. https://doi.org/10.64344/inta.v1i2.61

Tjahyanti, S., Gunarso, S., Wiyanto, M., Gulo, Y., Nurwanti, N., Athifah, M. R., & Kahendra, F. (2026). *Buku Ajar Budaya Organisasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Upe, A. (2025). *Pembangunan Sosial Di Era Society 5.0*. Literasi Indonesia.

Wahyudi, H. (2026). *Birokrasi dan Kebijakan Publik dalam Mitigasi Bencana*. Kreasi Cendekia Pustaka.

Wanto, A. H. (2026). *Manajemen Publik (Membangun Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Spirit Kewirausahaan (Entrepreneurship)*. Universitas Brawijaya Press.

Widanti, N. P. T. (2022). Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Abdimas Peradaban: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *3*(1), 73–85. https://doi.org/10.54783/ap.v3i1.11

Wisesa, A. (2011). Integritas Moral Dalam Konteks Pengambilan Keputusan Etis. *Jurnal Manajemen Teknologi*, *10*(1). https://journal.sbm.itb.ac.id/index.php/mantek/article/view/133